

LAPORAN HASIL
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG



MODEL KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK (LPKA) RAMAH ANAK BERBASIS KEMANDIRIAN
DAN BUDI PEKERTI

TIM PENGUSUL

INTAN FITRI MEUTIA, Ph.D.
NIDN 0020068502
BAYU SUJADMIKO, Ph.D
NIDN 0029048501

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : MODEL KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) YANG RAMAH ANAK BERBASIS KEMANDIRIAN DAN BUDI PEKERTI

Manfaat sosial ekonomi : Membentuk Kemandirian (Ekonomi Kreatif) dan Budi Pekerti untuk Anak-Anak Lapas.

Jenis penelitian penelitian dasar penelitian terapan
 pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D
b. NIDN : 0020068502
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
e. Nomor HP : 081369694554
f. Alamat surel (e-mail) : intan.fitri@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1) Q1

a. Nama Lengkap : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D
b. NIDN : 0029048501
c. Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1
Jumlah alumni yang terlibat : 1
Jumlah staf yang terlibat : 1
Lokasi kegiatan : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung di Tegineneng, Pesawaran, Lampung
Lama kegiatan : 1 tahun
Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
Sumber dana : DIPA UNILA

Bandar Lampung, 20 Februari 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi



Dr. Bambang Utoyo S, M.Si
NIP. 196302061988031002

Ketua Peneliti,



Intan Fitri Meutia Ph.D.
NIP. 198506202008122001

Menyetujui,

Ketua LPPM Unila



Warsono, Ph.D.

NIP. 196302161987031003



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP. 195701011984031020

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Judul Penelitian : MODEL KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) RAMAH ANAK BERBASIS KEMANDIRIAN DAN BUDI PEKERTI

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	INTAN FITRI MEUTIA, Ph.D.	Ketua	KEBIJAKAN PUBLIK	ADMINISTRASI PUBLIK	20
2.	BAYU SUJADMIKO, Ph.D.	Anggota 1	HUKUM	HUKUM BAGIAN INTERNASIONAL	15

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Anak-anak penghuni Lapas di LPKA Kelas II Bandar Lampung Tegineneng, Lampung
4. Masa Pelaksanaan
 Mulai : bulan April tahun 2018
 Berakhir : bulan November tahun 2018
5. Usulan Biaya : Rp. 40.000.000,-
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : LPKA Kelas II Bandar Lampung/LPKA Tegineneng, Pesawaran, Lampung
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya): LPKA Tegineneng, LSM Anak dan Dinas Pendidikan untuk Pendampingan Pola Pendidikan dan Pengasuhan Anak-Anak Lapas.
8. Temuan yang ditargetkan lulusan S-2 : Tesis yang berfokus pada Model Rasionalisasi Proses Formulasi Kebijakan (Hukuman) Pendidikan anak-anak Lapas.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek): Formulasi kebijakan pola hukuman (sesuai UU) melalui sistem pendidikan anak-anak Lapas yang berfokus Membentuk Kemandirian dan Budi Pekerti untuk Anak-Anak Lapas. Diharapkan pemahaman anak-anak Lapas ketika nanti keluar dari lapas sudah mampu untuk mandiri dan berwirausaha (ekonomi kreatif) dan mampu berperilaku dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan yang aman dan nyaman.
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima Hibah Penelitian Pascasarjana (Nasional/ Internasional)
 a) Nasional : Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
 b) Internasional: Journals of Attention Disorder (JAD) - SAGE Journals

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam perspektif sosiologis administrasi hukum. Dimana penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa pada proses formulasi kebijakan model dari lembaga permasyarakatan (lapas) anak yang menekankan bagaimana memberikan pendidikan dengan prinsip equalitas terhadap sekolah anak-anak biasa, untuk anak-anak di lapas akan lebih dominan pada pendidikan budi pekerti yang luhur. Memberdayakan kaum muda dan mempersiapkan mereka untuk sukses dalam pengetahuan ekonomi di masa depan merupakan fokus pendidikan yang berkualitas saat ini sesuai dengan tujuan keempat dari tujuh belas tujuan pembangunan yang berkelanjutan - *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk itu diperlukan deskripsi awal atas peluang dan tantangan bagi pendidikan kaum muda, khususnya kaum muda marginal seperti anak-anak penghuni lapas.

Anak-anak lapas nantinya akan diperkenalkan dengan *economic-literacy* (pengetahuan ekonomi) untuk membentuk kemandirian. Pengetahuan ekonomi ini dapat dimanfaatkan untuk masa depan melalui kerangka pikir dan visi entrepreneurship. Pembentukan kemandirian juga berkaitan dengan *lifeskill* (kemampuan diri) anak itu sendiri dalam rangka integrasi pasca keluar dari lapas, sekaligus untuk membangun kemandirian pendanaan lapas semasa anak-anak dibina di lapas tersebut. Model *lifeskill* yang dikonsepsi nantinya tentu akan disesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang anak, ini bertujuan untuk menciptakan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang adaptif akan konsep ramah atau layak anak.

Lokasi penelitian adalah pada LPKA Tegineneng, Propinsi Lampung. Saat ini (pra-riset Januari 2018) jumlah anak penghuni lapas di LPKA Tegineneng sebanyak 359 orang anak. Rentang usia 14-18 tahun dengan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas). Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar aparatur LPKA memfasilitasi dengan mendatangkan guru dengan proses pendampingan dari NGO anak di Pesawaran, Lampung tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemerintahan terkait langsung yaitu dinas Pendidikan.

Model kebijakan yang akan diformulasikan nanti diharapkan dapat diterapkan secara langsung untuk anak-anak lapas selama menjalani masa hukumannya sesuai dengan UU yang berlaku. Kebijakan yang dibuat nantinya dapat diaplikasikan melalui sistem pendidikan yang menitikberatkan pada hasil akhir kemandirian dan budi pekerti. Tujuannya agar anak-anak selama di lapas mendapatkan ilmu pengetahuan (*lifeskill*) yang sesuai prinsip kewirausahaan untuk membentuk pribadi mandiri dan budi pekerti yang sesuai untuk penguatan moral agar anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan di LPKA mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Lapas diharapkan punya prioritas dalam membangun pusat pelatihan kreatifitas mandiri anak muda, seperti halnya BLK (Balai Latihan Kerja), contoh untuk media pembelajaran aplikatif (pelajaran menulis, menggambar dan bermain musik), latihan verbal (menyanyi, pidato, ceramah) dan *hard skill* (keterampilan).

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	5
2.2 Tinjauan Tentang Pola Pendampingan Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti	10
2.3 Tinjauan Tentang LPKA	12
BAB 3. METODE PENELITIAN	14
3.1 Bagan Penelitian	14
3.2 Lokasi Penelitian	14
3.3 Indikator Capaian	15
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	17
4.1 Anggaran Biaya	17
4.2 Jadwal Penelitian	18
BAB 5. HASIL PENELITIAN	19
5.1 Gambaran Umum	19
5.2 Hasil dan Pembahasan	20
5.2.1 Indikator Ramah Anak	20
5.2.2 Indikator Kemandirian	22
5.2.3 Indikator Budi Pekerti	26
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	30
6.1 Kesimpulan	30
6.2 Saran	30
REFERENSI	32
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Didukung oleh pasal 31 dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Pendidikan adalah hak segala bangsa itulah amanat dari undang-undang tersebut.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua masih merupakan fokus pembangunan utama di Indonesia. Salah satu pendidikan yang masih menjadi sorotan adalah pada kebutuhan pembinaan terhadap narapidana anak yang masih dalam usia sekolah. Hak anak-anak narapidana ini untuk tetap mendapatkan pendidikan formal yang setara ketika berada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru. Didalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya dijelaskan bahwa remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh (Waluyadi, 2009: 57-63):

- a. Pendidikan;
- b. Latihan keterampilan dan latihan kerja;
- c. Rekreasi;
- d. Memeluk agama;
- e. Mendapatkan perawatan kesehatan;
- f. Pemberitahuan tentang kesehatan dan
- g. Berhubungan dengan masyarakat luas

Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun dan kini mencanangkan kebijakan pemerintah yang tengah diupayakan yaitu menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini tentunya berlaku pula untuk anak-anak narapidana yang sedang menjalani proses hukuman di lapas (lembaga pemasyarakatan) untuk

mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pada hakikatnya warga binaan permasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik, termasuk terpenuhi hak pendidikan bagi anak-anak di Lapas. Meskipun mereka berada pada lembaga permasyarakatan tetapi hak pendidikan mereka tidak boleh diabaikan. Memperkuat sekolah di Lapas dengan membuka akses bagi penghuni khususnya Lapas anak adalah hal yang patut diperhatikan agar anak-anak tetap dapat menimba ilmu dan melanjutkan pendidikannya.

Bila anak Lapas tidak mendapat pendidikan yang memadai, mereka tidak dapat memiliki bekal ilmu yang baik setelah menghirup udara bebas untuk menghadapi dunia di luar penjara yang kompetitif. Mereka akan terisolasi, tidak dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi bodoh dan tertinggal sehingga kemungkinan besar mereka dikucilkan dan tidak dapat diterima kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat. Dampak besar dari itu, Indonesia akan kekurangan individu dan sumber daya yang baik, berkarakter, dan mampu memajukan peradaban serta kesejahteraan umat dikarenakan tidak mampu memperluas jangkauan pendidikannya hingga Lapas Anak. Untuk itulah diperlukan suatu kurikulum dan guru yang sesuai dengan metode pendidikan untuk anak-anak lapas (<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/05/02/mm5jgr-pendidikan-untuk-anak-lapas//> diakses pada tanggal 1 februari 2018).

Pendidikan yang diperoleh narapidana di Lembaga Permasyarakatan dipandang dapat menjembatani terlaksananya proses pendidikan yang terhenti pada pendidikan formal. Dalam hal ini Pendidikan Luar Sekolah memiliki peran sendiri yaitu sebagai complement dari pendidikan sekolah. Artinya, bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam pendidikan sekolah. Kebutuhan warga binaan akan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat tercapai melalui pendidikan non formal. Program pendidikan di Lembaga Permasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi narapidana (warga binaan). Ruang lingkup pembinaan

narapidana di Lembaga Perasyarakatan dibagi menjadi dua bidang yakni program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Salah satu tempat penyelenggaraan program kemandirian berupa pembinaan keterampilan yang dilaksanakan di bengkel kerja, dimana salah satu keterampilan yang dipelajari yaitu pembinaan keterampilan elektronika. Program pembinaan keterampilan ini merupakan salah satu wujud pembinaan kemandirian yang memberikan bekal kepada narapidana agar dapat meningkatkan keterampilan kerja dan kemandirian untuk berwirausaha di bidang elektronik atau jasa service elektronik. Adanya pendidikan bagi narapidana dengan program pembinaan keterampilan diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang berkualitas dan mampu berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, narapidana dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk membuka peluang kerja dengan wirausaha dalam bidang elektronik seperti jasa service. Pola pendidikan yang berbasis kemandirian pada anak-anak lapas dimulai dari pemahaman akan pengetahuan ekonomi (*economic literacy*) menuju pemahaman akan konsep kewirausahaan. Dalam materi kemandirian diharapkan anak-anak mampu membangun mindset cinta tanah air, produksi dalam negeri hingga mau dan bangga menghasilkan barang produksi sendiri.

Latar belakang kasus narapidana yang berbeda dengan karakter yang berbeda tentu akan mempengaruhi dalam pelaksanaan program pembinaan yang diberikan. Apabila warga telah menjalani pembinaan keterampilan dan memiliki kemampuan keterampilan, namun tidak diimbangi dengan menunjukkan perilaku wirausaha juga tidak akan terwujud. Dengan kata lain warga binaan harus memiliki sikap wirausaha untuk membentuk perilaku wirausaha yang nantinya digunakan sebagai bekal setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan. Pendampingan yang tidak kalah penting adalah dalam hal pendidikan budi pekerti. Dimana budi pekerti ini akan membentuk bagaimana anak-anak lapas mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ketika telah keluar dari LPKA tersebut. Ketika anak-anak tersebut mempunyai budi pekerti maka mereka akan mampu untuk turut serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Model Kebijakan LPKA yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti yang tepat untuk diterapkan pada Pola Pendampingan Anak-anak Penghuni Lapas di LPKA Kelas II Bandar Lampung/ Tegineneng, Pesawaran, Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi Model Kebijakan LPKA yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti di LPKA Kelas II Bandar Lampung/ Tegineneng, Pesawaran, Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Kebijakan Publik dan Aspek Ilmu Hukum.
2. Secara Praktis, penelitian dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya LPKA Tegineneng, Pesawaran, Lampung dalam merumuskan Pola Pendampingan yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

A. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum menurut Eystone (1971: 18) merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan Publik ialah *“the relationship of governmental unit to its environment”* adalah antar hubungan yang berlangsung di antara unit/ satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Selain itu menurut Wilson (2006: 154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : *“The actions, objectives, and pronouncements, of goverments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)”* yaitu tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Menurut Thomas R. Dye (1978; 1987: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah *“whatever governments choose to do or not to do”* yaitu pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Selain itu Pakar Perancis, Lemieux (1995: 7), merumuskan kebijakan public sebagai berikut: *“The product of activities aimed at the resolution of public problems ini the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time”* yaitu produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang berhubungan terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Selain itu menurut Easton dalam Winarno (2012:20) kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai, *“Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.”* Selain itu menurut Udoji dalam Wahab (2008:5) kebijaksanaan negara sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan menurut Suharno (2008:11) istilah kebijakan akan disepadankan dengan kata policy. Istilah berbeda maknanya dengan kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebijakan (virtues). Demikian Budi Winarno dan Solichin A. Wahab dalam Subarsono (2005:2) sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goal) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Grand Design.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan kebijakan publik ialah hubungan yang berlangsung antara satuan unit pemerintahan yang terstruktur dimana terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan mengenai suatu masalah dalam bentuk tindakan-tindakan maupun produk aktivitas-aktivitas untuk diimplementasikan nantinya agar tercapai tujuan (goal), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan Grand Design. Konteks Penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan dalam menentukan pola pendampingan kemandirian dan budi pekerti sehingga terarah untuk menemukan Informan dan hasil dari penelitian ini.

B. Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Charles Lindblom dalam Wahab (2008:16), menuturkan bahwa pembuatan kebijaksanaan negara (*public policy-making*) itu pada hakikatnya merupakan “*an extremely complex, analytical and political to which there is no beginning and or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces effects called policies*” merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijaksanaan negara itulah yang kemudian membuahkan hasil yang kita sebut sebagai kebijaksanaan. Selain itu Raymond Bauer dalam Wahab (2008:16) merumuskan pembuatan kebijaksanaan negara sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output-output politik. Selanjutnya menurut Anderson dalam Winarno (2012:96) perumusan kebijakan menyangkut upaya bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ahli lain, Kaufman dalam Parsons (2011:376) menyatakan dalam formulasi kebijakan Pembuat keputusan membawa preferensi, pengetahuan, keahlian, dan kekuasaannya yang berasal dari pandangannya, keahlian khususnya, atau akses ke sumber daya. Selain itu, menurut Parsons (2011:274), formulasi kebijakan dalam perspektif rasionalitas adalah keputusan ekonomi manusia berdasarkan pilihannya berdasarkan semua informasi yang diperlukan yang tersedia, membandingkan informasi tentang opsi yang berbeda dan kemudian memilih opsi yang bisa membuatnya mendapatkan tujuan atau memenuhi kepentingannya. Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa proses perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijakan publik. Proses yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh para aktor yang saling berinteraksi satu sama lain dengan membawa preferensi masing-

masing serta kepentingan yang beragam untuk menghasilkan perubahan dari kebijakan pola pendampingan anak-anak ini menjadi *output*.

C. Tahapan-tahapan Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Islamy dalam buku Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000:77-101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

a. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiaognosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan formulasi kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

b. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Mengingat pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder dalam Islamy (2000:83) mengartikan kebijakan sebagai: “Agenda sistemik terdiri atas semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-masing”.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah dengan pemilihan alternatif-alternatif pilihan kebijakan. Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:

- 1) Mengidentifikasi Alternatif.
- 2) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
- 3) Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.
- 4) Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan.

d. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Menurut Islamy (2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) *Persuasion*, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri; (b) *Bargaining*, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur sedikit-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. *Bargaining* meliputi perjanjian (*negotiation*); saling memberi dan menerima (*take and give*); dan kompromi (*copromise*); sehingga penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

D. Aktor (Stakeholders) dalam Formulasi Kebijakan Publik

Winarno (2012:126) bahwa kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan publik dibagi kedalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para

pemeran serta tidak resmi. Kelompok pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislative dan yudikatif. Sedangkan kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warganegara individu.

a. Badan-Badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintah)

Sistem administrasi di seluruh dunia mempunyai perbedaan dalam hal karakteristik-karakteristik, seperti ukuran dan kerumitan, organisasi, struktur hierarkis dan tingkat otonomi.

b. Presiden (Eksekutif)

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial maupun dalam rapat-rapat kabinet.

c. Lembaga Yudikatif

Pada dasarnya, tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika keputusan-keputusan tersebut melawan atau bertentangan dengan konstitusi negara, maka badanyudikatif ini berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan.

d. Lembaga Legislatif

Di Indonesia dikenal sebagai DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif. Lembaga ini bersama-sama pihak eksekutif (presiden dan pembantu-pembantunya) memegang peranan yang krusial di dalam perumusan kebijakan. Setiap Undang-Undang menyangkut persoalan-persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga yudikatif.

e. Kelompok-Kelompok Kepentingan

Kelompok ini merupakan pemeran serta tidak resmi yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara.

f. Partai-Partai Politik

Partai-partai politik di dalam sistem demokrasi memegang peranan penting. Dalam sistem tersebut arti politik digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dalam masyarakat modern, partai-partai politik seringkali melakukan "agregasi kepentingan". Partai-partai

tersebut berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dalam dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.

g. Warganegara Individu (*Civil Society*)

Dalam pembahasan mengenai pembuatan kebijakan, warganegara individu sering diabaikan dalam hubungannya dengan legislatif, kelompok kepentingan seta pemeran serta lainnya yang lebih menonjol.

2.2 Tinjauan Tentang Pola Pendampingan Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti

A. Tinjauan Tentang Anak

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada penelitian ini anak yang dalam pembinaan Lapas adalah dalam rentang usia 14-18 tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung/Tegineneng, Pesawaran, Lampung.

B. Konsep Ramah Anak

Kata ramah anak mulai marak dipakai setelah diadopsinya Hak-hak anak oleh PBB yang kemudian diratifikasi oleh hampir seluruh anggota PBB pada tahun 1989. Sejarah Hak Anak sebagai turunan langsung dari Hak Asasi Manusia adalah salah satu kisah perjalanan panjang sejarah perjuangan hak asasi manusia. Setelah perang dunia II yang menyebabkan banyaknya anak-anak yang menjadi korban, pada tahun 1979 dibentuk sebuah kelompok kerja untuk merumuskan hak anak. Kelompok kerja ini kemudian merumuskan Hak-hak Anak yang kemudian pada tanggal 20 November 1989 diadopsi oleh PBB dan disyahkan sebagai Hukum Internasional melalui konvensi PBB yang ditandatangani oleh negaranegara anggota PBB.⁴⁷⁾

Sesuai bunyi Pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan

diskriminasi. Salah satu hak dasar anak tersebut adalah hak berpartisipasi yang diartikan sebagai hak untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada penelitian ini Konsep LPKA ramah anak adalah sebagai bentuk LPKA atau Sekolah sementara ramah anak adalah tempat anak-anak penghuni lapas mendapatkan pendidikan yang dalam prosesnya secara terbuka melibatkan anak dan remaja penghuni lapas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak-anak penghuni LPKA tersebut.

C. Pola Pembinaan Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti

Poernomo (1986: 187), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan tersebut sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah pembinaan menurut Poernomo, harus tertuju kepada:

- 1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- 2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Kemandirian berasal dari kata *Autonomy* yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri (Kartono, 2007). Menurut Desmita (2013) kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya dengan mencari identitasnya, yang merupakan proses perkembangan kearah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Havigust menambahkan (dalam Yusuf, 2006) yang dimaksud dengan kemandirian adalah kebebasan individu untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri, dapat membuat rencana untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta bebas dari pengaruh orang tua.

Menurut Nurul Zuriah (2008: 53-57) dalam buku Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan, pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti. Menurut Thomas Lickona dalam Heri Gunawan (2012:23) menyebutkan bahwa pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Menurut Ramli dalam Heri Gunawan (2012:23) pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan bagaimana hal terkait lainnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sifat khas yang terpatrit pada diri seseorang, diwujudkan melalui nilai-nilai moral kemudian menjadi ciri khas seseorang yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat dikatakan berkarakter atau berwatak jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Pada penelitian ini anak-anak lapas nantinya dapat bergabung dan adaptif terhadap lingkungan sekitarnya sehingga mampu ikut serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera.

2.3 Tinjauan Tentang LPKA

A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA menurut Pasal 1 pada UU No. 11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Di dalam LPKA, anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.

B. Tujuan Pembinaan di LPKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.

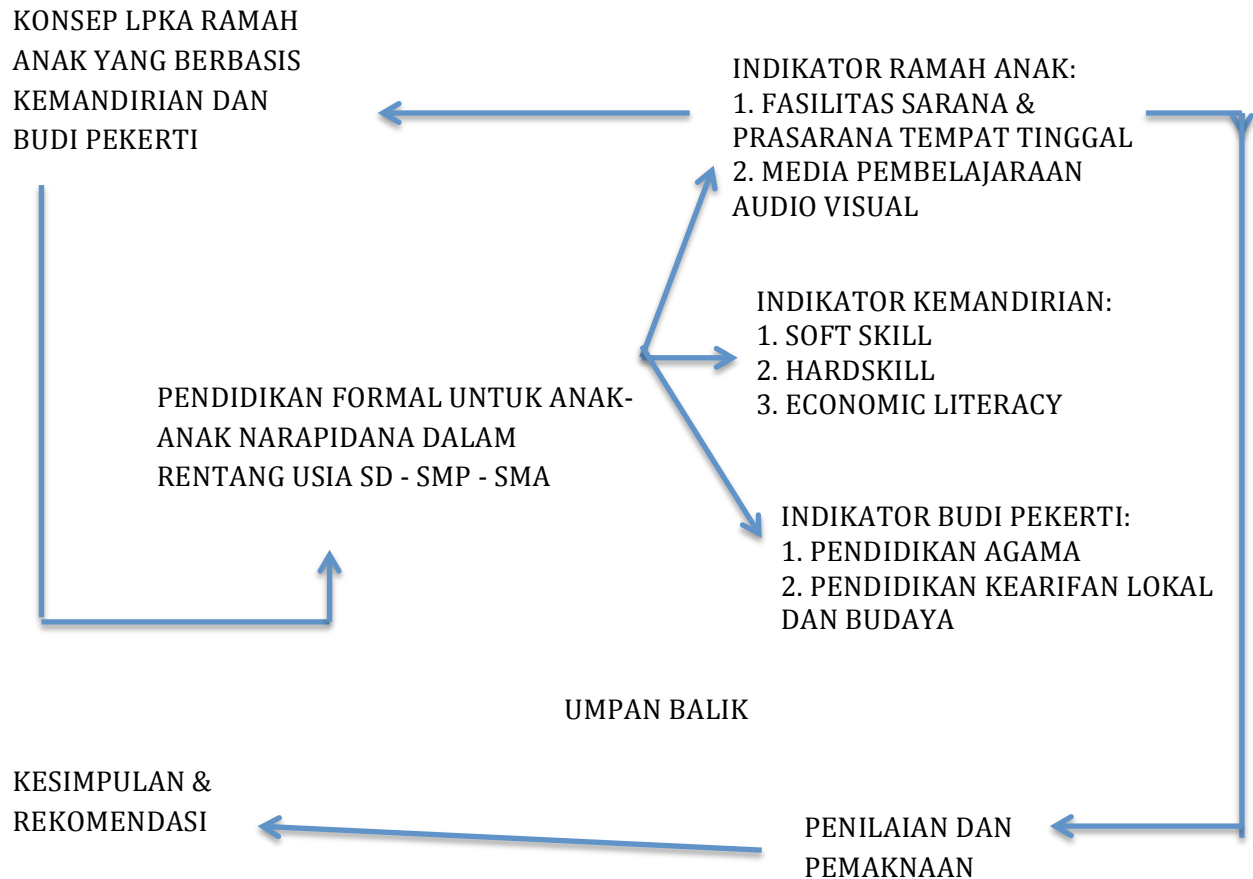
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan masyarakat bagi anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Bagan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dengan mengikuti kerangka berpikir paradigmatik sebagai berikut:



3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung yang berada pada Tegineneng, Pesawaran, Propinsi Lampung. Nantinya diharapkan model kebijakan yang diformulasikan tidak hanya dapat diterapkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung saja melainkan semua LPKA di Indonesia. Sehingga hak-hak pendidikan dari anak-anak penghuni Lapas dapat tercapai dengan tujuan kemandirian dan budi pekerti.

Objek Penelitian pada LPKA Kelas II Bandar Lampung ini terdiri atas 359 orang narapidana anak laki-laki yang berusia dari 14-18 tahun. Anak-anak penghuni Lapas ini saat ini

seharusnya mengenyam pendidikan dari rentang SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas).

3.3 Indikator Capaian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, disusun prosedur penelitian, yang digambarkan dalam tabel berikut:

TAHAP PENELITIAN		LUARAN		INDIKATOR CAPAIAN
Perumusan Masalah		Rumusan Masalah		Batasan dan kejelasan masalah
Pengkajian dan Pengembangan Teori		Kajian pustaka; Konsep Ramah Anak; Konsep Kemandirian dan Budi Pekerti		Kelengkapan, kemutakhiran, relevansi, dan kebermaknaan
Studi Pendahuluan		<ul style="list-style-type: none"> Gambaran umum tentang objek dan indikator penelitian Rancangan penelitian 		<ul style="list-style-type: none"> Rasional pemilihan objek penelitian keruntunan alur berpikir
Penyusunan instrumen penelitian		Pedoman observasi & pilihan dokumentasi		<ul style="list-style-type: none"> kejelasan indikator kejelasan parameter
Pengumpulan data		Data hasil pengukuran indeks kebutuhan anak-anak lapas baik keterampilan berbasis kemandirian (enterpreneurship) dan budi pekerti		<ul style="list-style-type: none"> kelengkapan keakuratan relevansi
Pengolahan data		Hasil pengolahan data		<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan teknik analisis data interpretasi yang komprehensif
Kesimpulan dan rekomendasi		Kesimpulan penelitian yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan konsep model pendidikan		Konsep yang digambarkan secara komprehensif melalui narasi
Diseminasi penelitian		<ul style="list-style-type: none"> Model Kebijakan untuk rekomendasi LPKA 		<ul style="list-style-type: none"> Approval judul tesis mahasiswa bimbingan International confrence Submit Jurnal Nasional & Internasional

		<ul style="list-style-type: none">• Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk Tesis (bimbingan mahasiswa s2), Prosiding penelitian dan Jurnal Nasional & internasional		
--	--	--	--	--

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PENGADAAN ALAT DAN BAHAN				
1	Pengadaan Literatur Penelitian	10	Buah	250,000	2,500,000
2	Flashdisk 64GB	3	Buah	250,000	750,000
3	USB On-The-Go 64GB	3	Buah	300,000	900,000
4	Micro SD Voice Recorder 64GB	3	Buah	250,000	750,000
5	Sewa Kamera Go-Pro Hero 4	12	Hari	300,000	3,600,000
6	Sewa Tape Recorder	12	Hari	250,000	3,000,000
7	Pembelian Paket Souvenir	20	Paket	250,000	5,000,000
	Jumlah				16,500,000
2	PENGELUARAN PERJALANAN				
1	Sewa Mobil Pra-Survei	2	Hari	600,000	1,200,000
2	Sewa Mobil Turun Lapangan	12	Hari	600,000	7,200,000
3	Konsumsi Tim Peneliti dan Tenaga Enamurator	70	Porsi	35,000	2,450,000
	Jumlah				10,850,000
3	BAHAN HABIS PAKAI				
1	Kertas HVS A4 70 GSM	5	Rim	50,000	250,000
2	Kertas HVS F4 70 GSM	5	Rim	50,000	250,000
3	Catridge Hitam HP 1510	3	Buah	200,000	600,000
4	Catridge Warna HP 1510	2	Buah	250,000	500,000
5	Ballpoint Aneka Warna	1	Kotak	45,000	45,000
6	Baterai Voice Recorder	5	Set	15,000	75,000
	Jumlah				1,720,000
4	FOCUS GROUP DISCUSSION				
1	Konsumsi Peserta FGD dan Tim Peneliti	23	Porsi	35,000	805,000
2	Snack Peserta FGD dan Peneliti	23	Kotak	5,000	115,000
3	Transportasi Peserta FGD	23	Orang	95,000	2,185,000
4	Administrasi dan Surat Menyurat	1	Paket	150,000	150,000
5	Seminar Kit	23	Paket	40,000	920,000
6	Banner	2	Buah	250,000	500,000
7	Kertas Plano	1	Paket	150,000	150,000
8	Kertas HVS A4 80 GSM	2	Rim	59,500	119,000
9	Kertas HVS F4 80 GSM	2	Rim	60,500	121,000
1	Spidol Papan Tulis	3	Box	45,000	135,000

	0						
		Jumlah					5,200,000
5	PENGOLAHAN DATA, LAPORAN DAN PUBLIKASI						
	1	Pengolahan Data Penelitian	1	Paket	2,000,000	2,000,000	
	2	Konsumsi Tenaga Enamuratur (3 Hari x 2 Orang)	18	Porsi	35,000	630,000	
	3	Konsumsi Tim Peneliti (10 Hari x 3 Orang)	60	Porsi	35,000	2,100,000	
	4	Penggandaan dan Jilid Proposal	10	Eksemplar	25,000	250,000	
	5	Penggandaan dan Jilid Laporan Kegiatan	10	Eksemplar	75,000	750,000	
		Jumlah					5,730,000
		Jumlah Keseluruhan					40,000,000

4.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan	X							
2	Pengumpulan data pra riset (observasi, dokumentasi, dan wawancara awal)	X							
3	Pengumpulan data lapangan lanjutan		X	X					
4	Pengolahan data				X	X			
5	Pembuatan draft laporan penelitian						X	X	
6	Seminar hasil penelitian - Prosiding & Jurnal							X	X
7	Final report								X

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2018

BAB 5. HASIL PENELITIAN

5.1 GAMBARAN UMUM

Didikan orang tua sangat di perlukan terlebih bagi anak-anak yang berusia remaja seperti umur 15-18 tahun, pada masa-masa itu anak-anak sedang senang-senanginya mencari jati diri, dan suka untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Selain itu lingkungan pertemanan anak juga harus di perhatikan oleh orang tua, karena apabila mereka berteman dengan teman-teman dari lingkungan yang tidak sehat maka besar kemungkinan mereka juga akan terjerumus kedalam lingkungan yang tidak sehat tersebut. Apabila seorang anak sudah terjerumus kedalam lingkungan yang tidak sehat tersebut, dan akhirnya melakukan tindak kejahatan maka disitulah peran dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. LPKA ini hadir dalam rangka untuk memberikan pembinaan bagi anak-anak yang telah terjerumus kedalam dunia kejahatan di usia yang masih dini. Anak-anak yang telah terjerumus kedalam dunia kejahatan ini akan menghabiskan masa tahanannya di dalam LPKA dengan mengikuti prosedur dan kegiatan yang telah ditentukan oleh LPKA untuk membuat kepribadian dan karakter yang lebih baik dari sebelumnya.

LPKA Kelas II Bandar Lampung/ Tegineneng, Pesawaran, Lampung tahun ini meraih peringkat terbaik se-Indonesia dengan indikator layak anak yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Jumlah remaja yang menghuni LPKA di Lampung ini termasuk yang paling banyak ketiga se-Indonesia. LPKA ini dihuni oleh anak-anak remaja sebanyak 192 orang. Sejumlah 178 orang mendapatkan pendidikan formal dan non formal di LPKA, sedangkan sebanyak 14 orang mendapatkan pelatihan ataupun pelayanan sukarela di luar LPKA. Pembina di LPKA saat ini berjumlah 93 orang dan menerapkan sistem piket terjadwal selama 24 jam setiap harinya. Anak-anak yang dalam pembinaan di LPKA Provinsi Lampung ini berusia rata-rata 15 sampai 17 tahun, rata-rata mereka masih duduk di bangku SMP kelas 2. Mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah dengan pekerjaan orang tua ialah petani, buruh bangunan, nelayan dan pedagang dipasar. Beberapa dari mereka mengaku melakukan tindak kejahatan karena mengikuti teman-teman bermainnya yang kemudian mendapatkan uang, mulai dari situ mereka tergiur untuk mengikuti teman-temannya yang melakukan tindak kejahatan (berdasarkan hasil wawancara dari Sanwani dan Andiko), yang melakukan tindak kejahatan berupa begal motor dan maling motor karena mengikuti teman-temannya. Selain mengikuti teman-teman sepermainan, mereka melakukan

tindak kejahatan karena himpitan ekonomi, (pengakuan Andre) yang mengaku menjadi jambret di Kota Metro untuk membeli pakaian, ia tidak memiliki uang yang cukup oleh karena itu ia memutuskan untuk menjambret. Menurut pengakuan Andre ia baru pertama kali itu mencoba menjambret dan langsung ketahuan oleh warga sekitar.

Proses pembinaan di LPKA ini dilakukan dengan bantuan beberapa stakeholder terkait, akan tetapi yang lebih berperan adalah dari civil society ataupun Privat dibandingkan dengan Lembaga Pemerintahan yang lain. Saat ini LPKA berhubungan baik dengan PKBI, WIBER dan ATC dalam proses pembinaan anak-anak narapidana. Dengan pembinaan dari LPKA diharapkan anak-anak ini bisa memanfaatkan pembelajaran dan keahlian yang di berikan oleh LPKA untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik, minimal mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. LPKA juga dapat menjadi wadah untuk menemukan jati diri anak-anak tanpa khawatir terjerumus kedalam lingkungan negatif. Pembinaan kepribadian serta pengarahan minat menjadi salah satu hal yang dilaksanakan oleh LPKA untuk membantu anak-anak yang telah terjerumus kedalam lingkungan yang salah menjadi sadar dan dapat kembali kedalam lingkungan yang seharusnya mereka tempati sebagai anak remaja yang merupakan ujung tombak bagi pembangunan di Indonesia. Pendidikan agama dan moral menjadi konsumsi sehari-hari anak-anak yang ada dalam pembinaan LPKA, diharapkan pendekatan Rohani berbasis Moral ini dapat membentengi anak-anak melakukan perilaku melanggar hukum.

5.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.2.1. INDIKATOR RAMAH ANAK

a) Fasilitas Sarana dan Prasarana LPKA

Fasilitas dan Prasarana yang berada di LPKA sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan bagi anak-anak yang tinggal di LPKA. LPKA ini terdiri dari beberapa wisma (Gedung Kamar Tidur) yang didesain agar tidak terkesan seperti penjara, tetapi lebih seperti asrama siswa di Sekolah. Setiap wisma hampir terdiri atas 2 lantai masing-masing lantai terdiri dari 12 kamar dengan total 24 kamar, tetapi hanya lantai 1 yang terisi. Setiap kamar berukuran sekitar 3x6m, dengan rata-rata diisi 4 orang, walaupun kasur yang tersedia 4 ranjang bertingkat dengan total kasur 8.

Berdasarkan hasil wawancara semua narasumber mengaku merasakan kenyamanan saat berada di LPKA ini, fasilitas yang ada cukup memadai seperti kamar tidur yang nyaman dengan kasur bertingkat, satu kamar diisi rata-rata 4-7 orang, walaupun di beberapa kamar terdapat anak yang tidur satu kasur 2 orang (berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Sanwani dan Riskoni). Tetapi walaupun terdapat beberapa anak yang tidur bersama dalam satu kasur, mereka mengaku dapat tidur dengan nyenyak di LPKA ini. Makanan yang disediakan juga telah memenuhi standar gizi yang cukup dengan rasa yang lumayan enak. Bahkan di LPKA juga tersedia warung kantin jika anak-anak merasa ingin makan diluar menu harian yang disediakan LPKA. Melalui fasilitas dan prasarana yang memadai ini diharapkan anak-anak dapat kerasan tinggal dan melalui masa tahanan tanpa ada rasa bosan atau kangen rumah yang timbul dari diri anak-anak tersebut.

Perlakuan ataupun sikap kakak-kakak atau bapak-bapak penjaga LPKA juga menjadi salah satu faktor yang menentukan, apakah LPKA ini dapat menjadi LPKA yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian serta Budi Pekerti. Menurut penuturan para narasumber perlakuan kakak-kakak atau bapak-bapak penjaga LPKA sangat baik dan ramah. Kakak-kakak atau bapak-bapak penjaga di LKPA sangat jarang memberikan perlakuan yang kurang disukai, walaupun menurut salah satu narasumber, terkadang apabila membuat kesalahan yang berat mereka di beri hukum push up ataupun hukuman fisik lainnya (berdasarkan penuturan salah satu narasumber Danar Mustofa).

Selain fasilitas tinggal yang memadai untuk anak-anak, pembelajaran formal juga sangat di butuhkan terlebih rata-rata anak yang tinggal di LPKA ialah anak-anak yang masih menjalankan pendidikan sekolah menengah. Berdasarkan penuturan dari kelima narasumber, untuk anak-anak yang telah tinggal lebih dari 5 bulan di LPKA sudah mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah, sedangkan anak-anak yang tinggal kurang dari 5 bulan masih belum mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah, tetapi mereka mendapatkan pembelajaran tentang agama dari ustad yang berada di LPKA tersebut (berdasarkan hasil wawancara dengan Andiko dan Andre) dan beberapa keterampilan sederhana lainnya seperti membersihkan LPKA atau membantu tugas Dapur. Pembelajaran ini juga sangat penting bagi anak-anak mengingat mereka masih dalam usia pelajar yang memiliki kewajiban belajar, dengan harapan mereka tidak akan ketinggalan pelajaran walaupun mereka sedang dalam masa tahanan. Dengan adanya sarana pembelajaran yang sama seperti anak sekolah pada umumnya,

anak-anak yang tinggal di LPKA ini tetap dapat mengejar cita-citanya setelah keluar dari LPKA.

b) Media Pembelajaran Audio Visual

Proses belajar mengajar secara formal dilakukan oleh Guru baik itu SMP, SMA dan kejar paket A bekerja sama dengan salah satu sekolah swasta yaitu Yayasan Dwi Mulya dengan inisiasi LPKA saja tanpa adanya bantuan dari Dinas Pendidikan. Walaupun pendidikan formal dilakukan di LPKA, akan tetapi Ujian Nasional anak-anak tetap diikutkan ke Sekolah Yayasan Dwi Mulya tersebut dikarenakan minimnya fasilitas komputer untuk Ujian Nasional. Nantinya jika lulus Ujian Nasional SMP atau SMA anak-anak ini akan mendapatkan Ijazah resmi dari Sekolah di Yayasan Dwi Mulya. Kejar Paket A diberikan khususnya untuk anak-anak yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan resmi sebelum berada di LPKA. Saat ini ada sekitar 15 orang yang berusia 15-17 tahun yang ikut dalam pendidikan kejar paket A di LPKA ini.

LPKA menyediakan gedung sekolah yang mumpuni. Gedung tersebut terdiri dari beberapa ruangan, yaitu 3 ruangan kelas pendidikan formal (ruang SMP, ruang SMA, dan ruang kejar Paket A), ruangan audio untuk belajar musik, ruangan komputer, ruangan perpustakaan, dan ruangan aula untuk berkumpul jika ada acara khusus seperti siraman rohani. Media pembelajaran Audio dan Visual sangat disukai oleh anak-anak karena tidak membosankan dan menarik perhatian anak-anak, dengan menggunakan media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap proses pembelajaran. Proses belajar yang diberikan pada anak-anak yang baru menetap 2 bulan keatas ialah pembelajaran agama yang diberikan seorang ustad di LPKA (berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber Andre). Sedangkan anak-anak yang telah menetap 5 bulan keatas mendapatkan pembelajaran seperti layaknya di sekolah dengan kurikulum setiap hari. Proses belajar mengajar yang diberikan sangat baik, guru-guru yang mengajar ramah, dan pelajaran yang diberikan sama seperti di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa LPKA juga memberikan hak belajar yang dimiliki oleh anak-anak yang tinggal di LPKA. Walaupun mereka sedang menjalani masa tahanan akibat perbuatan kejahatan yang mereka lakukan, tetapi mereka masih bisa mengembangkan

ilmu pengetahuan dan tidak ketinggalan pendidikan dengan anak-anak yang belajar di sekolah seperti biasanya.

Terdapat ruangan terpisah untuk belajar dengan satu guru mengajar satu mata pelajaran dengan total terdapat 6 guru yang mengajar mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah murid sebanyak 30 orang untuk jenjang SMP kelas 2 sedangkan SMA kelas 2 terdapat 13 orang (berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Riskoni dan Sanwani). Hal ini menunjukkan bahwa LPKA sudah sangat memadai fasilitas pembelajaran formal bagi anak-anak, dengan adanya 6 orang guru yang mengajar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak akan pembelajaran formal sesuai dengan kurikulum di sekolah.

Namun, masih belum terdapat alat peraga yang dapat menunjang dalam proses belajar mengajar di LKPA ini (berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Danar Mustofa, Riskoni dan Sanwani). Diharapkan LPKA dapat menambah fasilitas alat peraga baik alat peraga audio visual maupun alat peraga lain dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang di berikan oleh guru terhadap anak-anak di LPKA. Dengan menambah media pembelajaran baik media Audio dan Visual seperti media Video ataupun Film, maupun media belajar lain, akan meningkatkan minat anak-anak dan membuat anak-anak lebih bersemangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di LPKA.

5.2.2 INDIKATOR KEMANDIRIAN

a) Soft Skill

Selain pembelajaran formal layaknya di sekolah pada umumnya, anak-anak di LPKI juga diajarkan mengenai keterampilan soft skill yang dapat menimbulkan sifat mandiri bagi anak-anak tersebut, baik itu keterampilan mengenai sikap kepemimpinan, cara berkomunikasi yang baik serta IQ dan EQ dimana mereka diajarkan untuk dapat mengatur emosi pribadi mereka, sehingga apabila mereka memiliki emosi yang meluap-luap mereka tidak secara langsung melimpahkan emosi itu pada perbuatan yang tidak baik seperti tindak kejahatan, begal motor, mencuri, mencopet dan lain-lain. Dengan adanya pembelajaran tentang IQ dan EQ diharapkan emosi mereka yang sedang dalam tahap remaja yang susah untuk dikendalikan dapat di kendalikan dengan baik, dan dapat

disalurkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar.

Bagi anak-anak yang baru menetap di dalam LPKA sekitar sebulan masih belum di berikan keterampilan tentang kepemimpinan, komunikasi dan pengembangan diri, mereka masih menjalani keseharian seperti bermain bola (berdasarkan wawancara dengan Andiko). Sedangkan keterampilan soft skill yang di berikan untuk anak anak yang baru menetap 2 bulan ialah diajarkan tentang penggunaan komputer, dan keterampilan pengembangan diri berupa nasihat yang diberikan oleh petugas LPKI (berdasarkan hasil wawancara dengan Andre). Sedangkan untuk anak-anak yang sudah menetap lebih dari 5 bulan hingga satu tahun mereka diberikan pembelajaran tentang arti kepemimpinan, bagaimana beretika yang baik, berkomunikasi yang baik dan sopan, serta pengembangan diri seperti motivasi yang diberikan oleh guru-guru yang megajar di LPKA. Kemudian saat di tanya tentang IQ dan EQ mereka tidak dapat menjelaskan secara rinci tetapi mereka mengaku diajarkan cara mengatur emosi baik baik oleh para guru dan petugas yang bekerja di LPKA (berdasarkan hasil wawancara oleh Danar, Riskoni dan Sanwani).

Berdasarkan penuturan dari keempat narasumber yang sudah menetap lebih dari 5 bulan mereka mengaku telah mendapat keterampilan soft skill yang cukup memadai. Diharapkan dengan adanya keterampilan soft skill ini dapat membantu anak-anak untuk membekali dirinya setelah mereka menyelesaikan masa tahanan mereka di LPKA. Sehingga setelah mereka keluar dan menyelesaikan masa tahanan mereka di LPKA mereka mednapat keterampilan yang baru, dalam menjalankan kehidupan yang baru sebagai pribadi yang baru, bahkan dapat memberi keterampilan bagi anak-anak saat akan mencari pekerjaan. Selain itu anak-anak juga akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dengan keterampilan soft skill yang mereka dapat di dalam LPKI, bahkan dapat membawa dampak positif bagi diri mereka sendiri serta lingkungannya sekitarnya.

b) Hard Skill

Selain soft skill anak-anak di LKPI juga di berikan keterampilan hard skill. Berbeda dengan keterampilan soft skill yang lebih dominan kepada pengaturan emosi, jati diri dan cara mememipin yang baik, kemampuan hard skill lebih condong kepada keterampilan fisik yang di miliki oleh anak-anak seperti cara mencukur rambu, cara memperbaiki alat-

alat elektronik. Anak-anak yang tinggal kurang dari 2 bulan, belum di berikan kemampuan hard skill berupa penggunaan computer, penggunaan alat musik, keterampilan memangkas rambut, keterampilan memperbaiki alat elektronik, menjahit, melukis, memasak, ataupun menulis (berdasarkan hasil wawancara dengan Andiko). Akan lebih baik apabila setelah seminggu mereka menetap di LPKI mereka langsung diberikan pembelajaran baik itu soft skill maupun hard skill agar mereka lebih cepat terbiasa dengan keadaan LPKI dan lebih memanfaatkan waktu dengan bijak.

Sedangkan bagi anak-anak yang menetap lebih dari 2 bulan mereka diberikan kemampuan hard skill yang masih sebatas pembelajaran tentang Komputer seperti pengoperasian Microsoft Word dan keterampilan menggambar (berdasarkan hasil wawancara Andre). Sedangkan hard skill yang diberikan pada anak-anak yang telah menetap lebih dari 5 bulan ialah penggunaan computer, penggunaan alat musik dan memotong rambut. Sedangkan keterampilan hard skill seperti peternakan, perikanan, pertanian dan memperbaiki barang elektronik masih belum diajarkan kepada anak-anak di LPKA. Walaupun terkadang mereka di ajarkan keterampilan lain seperti menulis, bermain musik dan memotong oleh pegawai di LPKA saat siang, (berdasarkan hasil wawancara penuturan dari Riskoni dan Sanwani). Dulu kegiatan hard skill itu pernah ada di LPKA akan tetapi kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai instruktur hard skill tersebut membuat kegiatan tersebut berhenti.

Pemberian hard skill ini merupakan pelengkap setelah diberikan keterampilan soft skill, setelah diberi keterampilan untuk mengatur dirinya sendiri kemudian anak-anak diberikan keterampilan fisik untuk bekerja nantinya di masa depan. Mereka akan lebih senang untuk mengasah keterampilan hard skill nya maupun bekerja sehingga minimal dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Namun akan lebih baik apabila hard skill yang diberikan LPKA ialah hard skill yang lebih dibutuhkan di dunia kerja, seperti keterampilan memotong rambut ataupun keahlian memperbaiki barang-barang elektronik, keahlian ini sangat dibutuhkan di dunia kerja, sehingga setelah menyelesaikan masa tahanan mereka dan memasuki dunia kerja, mereka sudah dibekali dengan keterampilan yang sangat memadai.

c) Economic Literacy

Pembelajaran tentang ekonomi ada baiknya di berikan kepada anak-anak sejak dini, agar mereka mengetahui seberapa pentingnya uang dan tidak melakukan sikap pemborosan. Hal ini juga di terapkan di dalam LPKA, anak-anak diberi pengetahuan tentang kewirausahaan, pendidikan ekonomi seperti arti konsumtif, arti produktif dan keterampilan lain yang berguna bagi anak-anak dimasa depan. Anak-anak yang baru menetap kurang lebih 2 bulan belum diberikan pembelajaran tentang kewirausahaan dan cara membuat sebuah kerajinan yang dapat dijual. Mereka baru mengetahui arti konsumtif yang menurut mereka ialah kegiatan membeli barang, serta arti cinta tanah air dengan cara membela tim bola Indonesia (berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Andiko dan Andre).

Sedangkan anak-anak yang telah menetap 5 bulan hingga setahun rata-rata telah di berikan pemahaman tentang kewirausahaan, perilaku produktif dan konsumtif dan juga telah diberikan pembelajaran tentang keahlian memotong dan membuat kursi walupun belum pernah menjual sesuatu pra karya atau kerajinan (berdasarkan penuturan narasumber Danang, Riskoni dan Sanwani). Ada baiknya apabila selain pemberian hard skill anak-anak diberikan keterampilan khusus seperti menjahit, menyulam, melukis dan membuat kerajinan tangan. Rata rata mereka setelah keluar dari LPKA ingin melanjutkan pendidikan (berdasarkan penuturan narasumber Andiko, Andre dan Sanwani). Sedangkan yang lainnya ingin langsung bekerja, seperti membuka toko baju ataupun bekerja di mini market. Berdasarkan penuturan anak-anak ini, mereka masih memiliki semangat yang besar untuk melanjutkan kehidupan yang jauh lebih baik setelah keluar dari LPKA. Mereka ingin kembali menimba ilmu dengan melanjutkan sekolah hingga jenjang kuliah, hal ini menunjukkan bahwa keinginan anak-anak ini untuk berguna bagi nusa dan bangsa masih sangat besar, oleh sebab itu pembinaan dari LPKA sangat di harapkan untuk membentuk pribadi yang kuat serta karakter yang berbudi pekerti luhur.

Dengan diberikannya pemahaman tentang arti produktif dan konsumtif diharapkan dapat memberikan wawasan dan pembelajaran baru bagi anak-anak di LKPA, dengan begitu pula mereka jadi tahu bahwa jika mereka menginginkan sesuatu maka mereka juga harus dapat menghasilkan sesuatu, sehingga mereka akan meninggalkan kebiasaan buruk seperti begal motor, mencuri, membobol rumah dan lain-lain. Mereka juga dapat belajar untuk berhemat, memilih untuk menabungkan uang mereka daripada membelanjakannya untuk hal yang kurang penting. Sehingga anak-anak akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik,

dapat mengatur dirinya sendiri dan memiliki keterampilan khusus untuk menambah penghasilan keluarga, sehingga anak-anak akan lebih memilih menggunakan waktunya untuk lebih produktif daripada menghabiskan waktunya dengan bermain dengan teman-teman yang membawa pengaruh negatif.

5.2.3 INDIKATOR BUDI PEKERTI

a) Pendidikan Agama

Selain pembelajaran formal, soft skill dan hard skill, dibutuhkan pula pembelajaran tentang agama bagi anak-anak yang tinggal di LPKA, karena pembelajaran agama adalah pembelajaran pertama yang di terima oleh anak-anak ini semenjak mereka masih kecil. Diharapkan selain memiliki keterampilan dan keahlian dalam belajar, anak-anak juga menjadi anak yang religus, sehingga mereka akan lebih sadar dan tidak melakukan kejahatan karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu mengetahui segala tindakan yang maupun buruk yang mereka lakukan. Karena itu LPKA juga memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang lengkap bagi berlangsungnya pembelajaran maupun kegiatan ibadah bagi semua agama anak-anak yang tinggal di LPKA (berdasarkan hasil wawancara dengan Andiko). Di LPKA terdapat Mushola dan Gereja untuk beragama. Saat ini terdapat 7 orang di LPKA yang beragama Hindu, Budha dan Kristen selebihnya ialah beragama Islam (berdasarkan hasil wawancara dengan Danar, Riskoni dan Sanwani). Sarana dan prasarana beribadah sangat lengkap bahkan anak-anak tidak pernah telat sekalipun untuk melaksanakan ibadah karena selalu diberi himbauan oleh para pegawai di LPKI untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, serta anak-anak mendapatkan pelajaran agama di setiap blok (berdasarkan hasil wawancara dari penuturan Andre). Salah satu hak asasi manusia yang harus diberikan ialah hak untuk beribadah, oleh karena itu LPKI memenuhi hak tersebut bagi anak-anak yang tinggal di LPKI. Dengan pendekatan diri kepada Tuhannya masing-masing diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat, seperti sebuah rumah yang kuat, jadi kemanapun dia pergi pondasinya tidak akan goyah, seperti saat di ajak teman-temannya untuk melakukan tindak kejahatan apabila ia memiliki akidah atau pondasi yang kuat maka ia tidak mudah goyang dan terjerumus kembali ke jalan yang salah. Anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, karena di semua agama tidak pernah diajarkan untuk berbuat kejahatan.

Mereka juga mengakui kesalahannya dan merasa menyesal tidak ingin mengulangnya kembali. Dengan pengakuan yang tulus dari mereka diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah mereka perbuat dan dengan pendidikan agama yang mereka dapat, mereka bias lebih teguh pada pendiriannya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi.

b) Pendidikan Kearifan Lokal dan Budaya

Pemberian pendidikan kearifan lokal dan budaya selain memberikan keterampilan baru tentang kebudayaan, anak-anak juga diharapkan dapat melanjutkan kebudayaan tradisional daerahnya masing-masing. Selain itu apabila mereka mau untuk melanjutkan keterampilan kebudayaan, hal tersebut dapat menjadi salah satu pendapatan bagi mereka di masa depan. Namun, belum ada pendidikan kearifan lokal seperti pembelajaran bahasa daerah maupun tari-tarian daerah, tetapi hampir semua anak menguasai bahasa daerahnya masing-masing. Sebaiknya LPKA selain memberikan pendidikan formal, soft skill dan hard skill juga memberikan pembelajaran tentang budaya dan kearifan lokal sehingga anak-anak yang rata-rata masih berusia remaja dapat mengembangkan minat dan bakatnya pada kebudayaan daerah dan juga dapat membantu melestarikan kebudayaan daerahnya masing-masing.

Walaupun tidak diberikan pendidikan atau pembelajaran tentang bahasa daerah, tetapi mereka rata-rata sangat menguasai bahasa daerahnya masing-masing bahkan ada beberapa anak yang dapat menarikan tari tradisional khas Lampung (berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Andiko dan Andre). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak di LPKA ini dekat dengan budayanya masing-masing, oleh karena itu bukan hal yang sulit apabila LPKA ingin mengadakan pendidikan kebudayaan, karena hal tersebut akan diterima dengan sangat positif bagi anak-anak di LPKA. LPKA juga dapat menyalurkan minat anak-anak, ke hal yang lebih positif daripada hanya bermain.

Keluarga dari anak-anak yang menjalani masa tahananannya di LPKA tidak mendapatkan kesulitan apabila ingin mengunjungi anaknya di LPKA. Tidak ada batasan untuk kunjungan keluarga, maksimal seminggu sekali keluarga diperbolehkan untuk datang menjenguk sekedar menanyakan kabar maupun membawakan makanan (berdasarkan hasil wawancara Andre). Bahkan terkadang anak-anak diperbolehkan menggunakan

ponsel untuk menelpon keluarganya (berdasarkan hasil wawancara dengan Danar, Riskoni, dan Sanwani). Hal ini sangat baik, melihat pertumbuhan remaja sangat memerlukan perhatian dari keluarga kandungnya, dengan diberikan kesempatan yang cukup untuk mempertemukan antara anak yang menjalani hukumannya dan keluarganya, membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitasnya di dalam LPKA dan memotivasi diri anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar dari LPK

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Model Kebijakan LPKA yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti yang tepat untuk diterapkan pada Pola Pendampingan Anak-anak Penghuni Lapas di LPKA Kelas II Bandar Lampung/ Tegineneng, Pesawaran, Lampung memerlukan beberapa indikator untuk aplikasinya. Upaya pembinaan yang telah dilakukan melalui beberapa Indikator penunjang, yaitu: indikator ramah anak dan indikator budi pekerti telah terlaksana dengan efektif. Indikator ramah anak diidentifikasi melalui Fasilitas sarana dan prasarana di LPKA itu sendiri, dan media pembelajaran audio visual. Indikator budi pekerti terdiri atas pendidikan agama dan pendidikan kearifan lokal dan budaya. Akan tetapi untuk indikator kemandirian masih perlu beberapa peningkatan dalam aplikasinya. Indikator kemandirian ini terdiri atas Soft skill, Hard skill, dan Economic Literacy. Kendala sumber daya baik dana, manusia dan fasilitas sebaiknya bisa diatasi dengan bantuan beberapa stakeholder terkait baik dari unsur Swasta, NGOs, dan aparaturnya pemerintah terkait.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk aplikasi Model Kebijakan LPKA yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan antar stakeholder khususnya yang mengatur Pola Pendidikan Formal di LPKA, mengingat salah satu hak dasar adalah pendidikan. Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dengan Kementerian Pendidikan bisa menjadi solusi untuk Model Kebijakan khususnya Pola Pendidikan Formal yang mengatur baik pembiayaan, sumber daya manusia (guru PNS), sehingga tanggung jawab pelaksanaan Sistem Pendidikan Formal di LPKA tidak hanya menjadi tugas pokok dari para aparaturnya pemerintah di LPKA ataupun Kemenkumham saja tetapi juga merupakan bagian dari tugas pokok Kementerian Pendidikan sebagai penyedia sistem Pendidikan di Indonesia.

2. Peningkatan kemampuan khususnya hardskill merupakan acuan untuk kemandirian anak-anak LPKA di masa yang akan datang, oleh karena itu pelatihan-pelatihan

peningkatan ketrampilan harus lebih dioptimalkan untuk diberikan di LPKA. Kemampuan seperti bertani, memelihara ikan, potong rambut, memahat, dan ketrampilan lainnya perlu ditekuni anak-anak LPKA, bukan hanya untuk motif ekonomi, tapi juga untuk peningkatan kepercayaan diri yang merupakan hasil dari kemandirian anak-anak LPKA di masa yang akan datang.

REFERENSI

Desmita. 2013. PSikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika

Poernomo, Bambang, 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem. Pemasarakatan, Libert. Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

Waluyadi, 2009. Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Yusuf, S dan Nurihsan, J. 2006. Landasan Bimbingan dan Konseling. Bandung. PT. PT Mutiara Nur Kencana.

Zuriah, Nurul. 2008. Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan, Jakarta: yusu Bumi Aksara,

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Website:

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/05/02/mm5jgr-pendidikan-untuk-anak-lapas//>

LAMPIRAN
Curriculum Vitae

1. Biodata Ketua Pengusul Penelitian Pascasarjana Universitas Lampung 2018

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (gelar)	Intan Fitri Meutia, SAN., MA., Ph.D.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ali
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	198506202008122001
5	NIDN	0020068502
6	Tempat Tanggal Lahir	Banda Aceh, 20 Juni 1985
7	Alamat Rumah	Jl. Sultan Badaruddin, Gg. Dahlia No.3
8	No.Telp/Hp	081369694554
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888
11	Alamat e-mail	intan.fitri@fisip.unila.ac.id
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= orang S2= orang S3= orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Reformasi Administrasi Publik 2. Manajemen Strategis Sektor Publik 3. Metode Penelitian Administrasi Publik 4. Analisis Kebijakan Publik

B. Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan	S1	S2	S3
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Lampung	Univ. Indonesia	Kanazawa University, Japan
Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi Negara	Magister Ilmu Administrasi	Human and Socio Environmental Studies
Thn Masuk	2004	2010	2013
Thn Lulus	2008	2012	2016
Judul Skripsi/ Tesis/	Kebijakan	Evaluasi	The

Disertasi	Pencegahan Trafficking di Provinsi Lampung (Studi Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafficking oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan)	Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap “Trust Building” Periode 2005-2010	Implementation of Community Policing in Indonesia
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si Simon Sumanjoyo Hutagalung, SAN., MAP.	Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.	Prof. Haruya Kagami Prof. Nobuhide Otomo Prof. Yoichi Nishimoto

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
			Sumber
1	2012	Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Trafficking Berbasis Pengelolaan Data pada Koordinasi Gugus Tugas (Ketua)	DIPA BLU Junior - Universitas Lampung
2	2012	Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung (anggota)	DIPA BLU FISIP - Universitas Lampung
3	2013	Penerapan Model 7s	DIPA BLU Junior - Universitas

		Mc. Kinsey di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung (Suatu Analisis atas Dampak, Budaya, Organisasi bagi Peningkatan Kinerja di Badan Usaha Milik Negara) (anggota)	Lampung
4	2013	Model Jaringan Kelembagaan dalam Rangka Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Daerah Otonom Baru di Propinsi Lampung (anggota).	Hibah Dikti - Penelitian Produk Terapan
5	2017	PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS DAYA SAING DAERAH (Implementasi Kebijakan Technopark di Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung tahun 2017)	DIPA BLU FISIP – Universitas Lampung

D.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2008	Penataran Peningkatan Pengelolaan Program-Program Pembangunan Bagi Aparat Desa di Kecamatan Sidomulya –Lampung Selatan	Dipa Unila	3.500.000

2	2009	Pemberdayaan Karang Taruna – Pemuda Desa di Kecamatan Gisting, Tanggamus	Dipa FISIP Unila	5.000.000
3	2009	Penyuluhan dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Bagi Sekretaris Desa di Kecamatan Abung Barat – Lampung Utara	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila	5.000.000
4	2012	Penyuluhan Hukum Mengenai Penggunaan Alat-Alat Teknologi Informasi Yang Aman Bagi Remaja Sesuai Dengan UU NO.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik di SLTP Negeri 7 Bandar Lampung.	Dipa Unila	3.500.000
5	2012	Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainer) Manajemen Organisasi Intra Sekolah Bagi Pengurus OSIS Se-KKM MAN 1 Metro Lampung Tengah.	Jurusan Administrasi Negara	5.000.000

E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	2008	Kebijakan Pencegahan Trafficking di Propinsi Lampung Tahun 2007	Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5
2	2015	Balinese vs Lampungnese : Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia.	Jurnal US-China Law Review. Vol.12 No. 1 January 2015,	12/1
3	2015	Community Policing to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia : A Case Study of Lampungnese VS Balinese.	Jurnal Human And Socio-Environmental Studies No.29 March	29

			2015	
4	2016	An Overview : Community Policing on Past and Present. Jurnal Human And Socio-Environmental	Jurnal Human And Socio-Environmental Studies No.31 March 2016,	31

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1.	The Fifth Asian Conference on the Social Sciences 2014.	Community Policing to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia (Study Case Lampungnese vs Balinese)	12-15 Juni 2014	Osaka, Japan
2	The 9th East Asian Conference on Philosophy of Law	Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia	21-23 September 2014	Seoul, South Korea.

G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Ruang Hijau Untuk Bermain dalam Buku Berbagi Inspirasi dari Negeri Sakura.	2015	153 (80-86)	Nida Dwi Karya Publishing

H.Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

I.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat

1.	Kajian Usulan Teknis, Besaran Presentase Retribusi Parkir Tepi Jalan (Jahan Fasos Fasum / Prasarana, Sarana dan Utilitaas Kota Tangerang Selatan)	2016	Kota Tangerang Selatan	
2.	Kajian Naskah Akademik, Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung	2017	Provinsi Lampung	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat sebagai Ketua Pelaksana dalam pengajuan Penelitian Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Februari 2018
Ketua Pengusul,

Intan Fitri Meutia, Ph.D.

2. Biodata Anggota I Pengusul Penelitian Pascasarjana

Nama : Bayu Sujadmiko, Ph.D.
Alamat Rumah (Lengkap) : Jl. Sultan Badarudin, Gg. Dahlia, No. 3
Gunung Agung, Tanjung Karang Barat,
Bandar Lampung, 35152.
Telepon Rumah : --
Nomor Ponsel : 0813 9419 4918
Alamat E-mail : bayusujadmiko@yahoo.com
bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Universitas Lampung
Gedung E Lantai 1, Jl. Soemantri Bojonegoro No 1
Rajabasa, Bandar Lampung.

Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1	Universitas Lampung	Hukum Internasional
S-2	Universitas Padjadjaran	Hukum Internasional
S-3	Kanazawa University	Hukum Internasional dan Tekhnologi

Nama Mata Kuliah yang Diampu

No	Nama Mata kuliah	Strata
1	Hukum Internasional	S-1
2	Hukum Perdata Internasional	S-1
3	Hukum Laut Internasional	S-1
2	Hukum Tekhnologi dan Informasi	S-1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan

Strata	Jumlah
S-1	-

S-2	-
S-3	-

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2013	<i>Property Right in Radio Frequency Utilization Under ITU (International Telecommunication Union) (Frequency Allocation in Indonesia).</i>	Mandiri
2014	Penyadapan Lintas Negara/Kedaulatan Ditinjau dari Hukum Internasional	Mandiri
2015	<i>Copyright Infringement: DRM Technologies and the Internet (International Frameworks and Business Practices, Part I)</i>	Mandiri
2016	<i>Piracy Culture and File-Sharing: Economic Approach, Online Market v. Physical Market</i>	Mandiri
2016	<i>Digital Sharing Cases and Japanese Copyright Enforcement.</i>	Mandiri

Pengalaman Pengabdian

Tahun	Tema Pengabdian	Tempat	Sumber Dana
2012	SOSIALISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVII/2012 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH	DESA BANDAR SAKTIKECAMATAN TERUSAN NUNYAI LAMPUNG TENGAH	DIPA FH UNILA

	BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK DESA BANDAR SAKTIKECAMATAN TERUSAN NUNYAI LAMPUNG TENGAH		
2012	PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENGUNAAN ALAT-ALAT TEKNOLOGI INFORMASI YANG AMAN BAGI REMAJA SESUAI DENGAN UU NO 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK	SMP 7 Bandar Lampung)	DIPA BLU Universitas Lampung 2012

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel Halaman	Name Berka la	Status Akreditasi	Penulis
Jurnal Fiat Justisia	2012	Volume 6, No.1 April 2012, Pengakuan Negara Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap Kemerdekaan Kosovo), Halaman 178-189.	--	DOAJ indexed, Belum terakreditasi	Bayu Sujadmiko
Journal of Human and Socio-Environmental Studies Kanazawa University)	2013	Volume 26, <i>Property Right in Radio Frequency Utilization Under ITU (International Telecommunication Union) (Frequency Allocation in Indonesia)</i> , page 27-39.	--	Jurnal Internasional tidak bereputasi	Bayu Sujadmiko
US-China Law Review	2015	Volume 12, No. 1, Januari 2015, <i>Balinese vs</i>	--	Jurnal Internasional tidak	1. Intan Fitri Meutia 2. Bayu

		<i>Lampungnese: Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia, page 49-61.</i>		bereputasi	Sujadmiko
Journal of Human and Socio-Environmental Studies (Kanazawa University)	2016	Volume 31, 14 Maret 2016, <i>Piracy Culture and File-Sharing: Economic Approach, Online Market v. Physical Market, page 51-67.</i>	--	Jurnal Internasional tidak bereputasi	Bayu Sujadmiko
Kanazawa Law Review	2016	Volume 59, No. 1, <i>The Way of Islam; The Muslim Life in Kanazawa, page 49-61.</i>		Jurnal Internasional tidak bereputasi	1. Bayu Sujadmiko 2. Nobuhide Otomo

Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
15 Penulis; Bayu Sujadmiko	Buku Monograf: Dimensi Hukum Internasional.	2014	Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan	978-602-1245-17-0

	Judul Artikel: Penyadapan Lintas Negara/Kedaulatan Ditinjau dari Hukum Internasional		(PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung	
14 Penulis; Bayu Sujadmiko	Buku Monograf: Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional. Judul Artikel: <i>Copyright Infringement: DRM Technologies and the Internet (International Frameworks and Business Practices, Part I)</i>	2015	<i>Justice Publisher</i> Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung	978-602- 1071-38-0

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat sebagai Anggota I dalam pengajuan Penelitian Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2018.

Bandar Lampung, 20 Maret 2018

Bayu Sujadmiko, Ph.D.



Ruangan Berlatih Musik lengkap dengan Peralatannya



Lapangan LPKA untuk Apel Pagi



Aula Pertemuan



Lapangan Olahraga



Papan Keterangan Kamar



Pintu masuk LPKA

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

MODEL KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK YANG RAMAH ANAK BERBASIS KEMANDIRIAN DAN BUDI PEKERTI

Riwayat Hidup:

- Adik namanya siapa?
- Umurnya berapa?
- Sudah berapa lama di LPKA?
- Kelas berapa sekarang?
- Dulu sekolah tidak? Dulu apakah adik ada kegiatan lain setelah pulang sekolah?
- Apakah Orang tua masih ada? Ayah pekerjaannya apa? Ibu pekerjaannya apa?
- Adik anak keberapa? Punya kakak? Punya adik?
- Mohon maaf jika boleh tau adik kenapa bisa di LPKA? Apakah adik sudah menyadari bahwa tindakan tersebut salah?
- Nanti keluar dari LPKA apa rencana atau keinginan adik ke depan?

1. INDIKATOR RAMAH ANAK

a) Fasilitas Sarana dan Prasarana Tempat Tinggal

- Apakah LPKA ini nyaman?
- Apakah adik bisa tidur nyenyak disini? satu kamar diisi oleh berapa orang? Tempat tidurnya sendiri-sendiri atau bertingkat?
- Apakah adik bisa makan sehat, enak, bergizi disini?
- Apakah kakak-kakak/bapak-bapak penjaga baik dalam bersikap sehari-hari?
- Apakah ada perlakuan kakak-kakak/bapak-bapak penjaga yang tidak adik sukai selama disini?
- Apakah adik masih bisa belajar seperti di sekolah di LPKA ini?
- Adik bisa belajar apa saja di LPKA?
- Apakah ada kemampuan baru yang adik bisa dapatkan disini?

b) Media Pembelajaran Audio Visual

- Mohon diceritakan bagaimana proses belajar mengajar di LPKA selama ini?
- Apakah setiap hari mendapatkan pelajaran formal (SD/SMP/SMA)?
- Apakah ada ruangan khusus untuk kelas belajar mata pelajaran sekolah? Satu kelas berapa orang? Ada berapa orang guru yang mengajar? Satu guru satu mata pelajaran atau satu guru banyak mata pelajaran?
- Apakah guru Adik di LPKA pernah menggunakan alat bantu? Alat peraga? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)

2. INDIKATOR KEMANDIRIAN

a) Soft Skill

- Apakah adik pernah menerima pelajaran mengenai kepemimpinan? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik pernah menerima pelajaran mengenai komunikasi? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik pernah menerima pelajaran mengenai pengembangan diri? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik tau tentang IQ (kecerdasan intelektual) dan EQ (kecerdasan emosional)? Jika tidak tolong jelaskan dulu apa itu IQ dan EQ. Kemudian tanya apakah Adik pernah menerima pelajaran mengenai IQ dan EQ? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)

b) Hard Skill

- Apakah adik bisa menggunakan komputer?
- Apakah selama di LPKA adik diajari penggunaan komputer? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik bisa bermain alat musik? atau bernyanyi?

- Apakah selama di LPKA adik diajari menggunakan alat musik? atau bernyanyi? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik bisa memotong rambut (pangkas rambut)?
- Apakah adik selama di LPKA pernah diajari untuk memangkas rambut? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik bisa memperbaiki barang elektronik?
- Apakah adik selama di LPKA pernah diajari untuk memperbaiki alat-alat elektronik? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah selama di LPKA adik diajari keterampilan lain, misalnya memasak, menjahit, melukis, menulis, dll? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)

c) Economic Literacy

(jiwa kewirausahaan, cinta tanah air-produksi dalam negeri, produktif dan tidak konsumtif

- Apakah adik di LPKA ini pernah diajari membuat sesuatu? Kerajinan tangan atau pra karya? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik mengetahui tentang kewirausahaan? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik mengetahui tentang produktif? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik mengetahui tentang konsumtif? (Jika ada tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)

- Apakah adik mengetahui tentang cinta tanah air? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah adik selama di LPKA pernah melakukan sesuatu yang menghasilkan uang? Misalnya menjual barang hasil pra karya/kerajinan, dll? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Jika nanti telah bebas / keluar dari LPKA apa rencana adik?? Ingin kembali sekolah? atau ingin mengembangkan keterampilan yang didapat di LPKA??

3. INDIKATOR BUDI PEKERTI

a) Pendidikan Agama

- Agama adik apa??
- Apakah selama di LPKA bisa beribadah sesuai dengan kepercayaan adik?
- Apakah sarana beribadahnya lengkap?
- Apakah adik mendapatkan pelajaran agama? (Jika ada tolong ceritakan detail, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi materinya, siapa saja pesertanya)
- Apakah ada diantara teman-teman adik yang tidak beragama islam?? Jika ada apa agamanya dan berapa orang?
- Mohon maaf jika boleh tau adik kenapa bisa di LPKA? Apakah adik sudah menyadari bahwa tindakan tersebut salah?

b) Pendidikan Kearifan Lokal dan Budaya

- Adik sukunya apa?
- Apakah adik menguasai bahasa daerah asal adik? Bahasa jawa, bahasa lampung?
- Dirumah adik menggunakan bahasa apa??
- Di LPKA ini adik menggunakan bahasa apa?
- Apakah adik mendapatkan pelajaran bahasa lampung?

- Apakah adik pernah melakukan kegiatan seni di LPKA ini? (Jika pernah tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana isi kegiatannya, dan siapa saja pesertanya)
- Apakah adik bisa menyanyi atau menari daerah? (Jika bisa tolong ceritakan detil, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana, dan siapa saja yang berpartisipasi)
- Apakah selama di LPKA keluarga adik pernah berkunjung? (Jika pernah tolong ceritakan detil, berapa kali, siapa saja dan biasanya apa yang dibicarakan atau dilakukan ketika bertemu keluarga)
- Apakah selama di LPKA adik pernah berkomunikasi dengan orang lain di luar di LPKA melalui ponsel? (Jika pernah tolong ceritakan detil, berapa kali, siapa saja dan biasanya apa yang dibicarakan)

=====Terima Kasih=====